

IMPLEMENTASI APLIKASI SIMAYA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI

Fitrawati

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: fitrawatiab67@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi termasuk dalam pengelolaan pemerintahan. Salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah aplikasi SIMAYA atau Sistem Administrasi Perkantoran Maya yang digunakan untuk mengurus persuratan serta pengarsipan dokumen. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFO) Kabupaten Sinjai adalah salah satu dinas daerah yang melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan aplikasi SIMAYA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan aplikasi SIMAYA di DISKOMINFO Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu khusus pada kepala divisi yang ada di DISKOMINFO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIMAYA belum berjalan dengan maksimal karena kendala fasilitas dan pemenuhan sumber daya yang belum merata.

Kata kunci: SIMAYA

PENDAHULUAN

Di era modernisasi seperti saat ini, kemajuan teknologi berkembang begitu cepat dalam penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, termaksud dalam bidang pemerintahan. Terlebih dalam era otonomi daerah saat ini sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal juga *e-government*. Dalam perkembangan zaman, Teknologi dan Informasi merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Sistem informasi merupakan salah satu jembatan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam arti yang luas sistem informasi merupakan interaksi yang terjadi antara manusia dan teknologi yang dapat mendukung jalannya proses bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Sistem informasi pula merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam suatu proses bisnis yang berjalan. Proses bisnis yang berjalan tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam proses tersebut terdapat data - data atau informasi yang penting bagi perusahaan tersebut dan harus terdistribusi dengan baik ke setiap bagian yang membutuhkan di dalam organisasi atau perusahaan.

Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diuraikan melalui peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Dengan demikian keabsahan dan legalitas siMAYA telah memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi agar

pekerjaan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien karena diatur oleh sebuah sistem. E-Office SiMAYA merupakan aplikasi administrasi perkantoran, korespondensi surat menyurat dinas bagi setiap karyawan perusahaan atau instansi instansi secara elektronik. Fungsi utama solusi aplikasi E-Office SiMAYA adalah penghematan waktu dalam pembuatan nota dinas dan proses deliverynya. Selain penghematan waktu juga terjadi penghematan biaya terutama pada biaya proses delivery nota dinas dan biaya kertas yang bisa di hemat. Dalam hal ini pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (DITJEN SDPPI KOMINFO) yang bergerak dalam mengatur sumber daya, perijinan telekomunikasi dan informatika indonesia menyadari dan mengerti betapa pentingnya sebuah teknologi informatika dan sistem informasi dalam sebuah perusahaan yang berupa E-Office. Selain kebutuhan akan surat menyurat, ada pula kebutuhan tentang bagaimana mengimplementasikan E-Office SiMAYA ini agar dapat berhasil dan berjalan dengan baik.

KAJIAN TEORI

E-Government

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) *e-government* adalah pegawai pemerintahan yang menjalankan tugas dengan menggunakan teknologi yang dapat mentransformasikan hubungan antara masyarakat, pebisnis, dan bagian pemerintahan. Menurut Heeks (2002), *e-Government* di artikan sebagai pemanfaatan Information Communication and Technology (ICT) untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian, juga dijelaskan bahwa *e-Government* mencakup: (1) *E-administration*, untuk mendukung proses administrasi pemerintahan, (2) *E-Citizen & e-Services*, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah yang hendak menyampaikan aspirasi, dukungan,serta meningkatkan layanan publik, (3) *E-Society*, membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara lebih baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat.

Dwiyanto (2011) mengemukakan bahwa birokrasi pemerintah yang dapat menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dapat mempermudah interaksi dengan masyarakat, mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan adalah tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang memberikan pelayanan. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk terus melakukan peningkatan dalam hal pelayanan publik.

Aplikasi SIMAYA

Salah satu inovasi dalam *e-government* yaitu penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA) yang dikembangkan oleh Ditjen Aplikasi Informatika tahun 2012. SIMAYA adalah aplikasi administrasi perkantoran yang mendukung proses manajemen persuratan

untuk memudahkan proses pencarian dan pengarsipan. Penerapan SIMAYA dilakukan pada instansi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja, serta tertib administrasi. Beberapa fitur dari SIMAYA adalah surat masuk, surat keluar, disposisi masuk, disposisi keluar, disposisi inisiatif, PNSBook (Linimasa, Status, Profil Berbagi Foto), asisten, arsip, administrasi kecamatan, administrasi kelurahan, dan administrasi kepegawaian dan merupakan digitalisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut Prajanti (2020) aplikasi SIMAYA merupakan output dari reformasi pelayanan publik secara elektronik, namun implementasi TNDE belum sepenuhnya mampu diterapkan, dibutuhkan proses yang lama agar implementasi TNDE dapat dilaksanakan seluruh pemerintahan di Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan aplikasi elektronik pelayanan masyarakat, seperti penggunaan e-surat yaitu pengurusan surat melalui aplikasi oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Pakpak Barat (Siregar, 2018). Dalam penelitian Jumino (2018) penerapan pelayanan IT juga diterapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu menggunakan aplikasi persuratan elektronik untuk mengelola arsip dinamis aktif berbasis web. Selain itu, Dinas KOMINFO Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan aplikasi SIMAYA.

Berdasarkan penelitian oleh Rudian (2019) terkait pelaksanaan TNDE di lingkup Balitbangtan tahun 2017–2018, dalam penggunaan aplikasi SIMAYA masih ada sekitar 50% persuratan yang belum diselesaikan, artinya bahwa hanya setengah pelayanan yang dapat dimanfaatkan dalam elektronik. Kemudian kendala serupa dikemukakan oleh Welfarendi, dkk. (2016) bahwa dalam pelaksanaan SIMAYA, terdapat banyak kendala dalam kesiapan suprastruktur dan infrastruktur seperti kurangnya komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam penggunaan IT, kurangnya ketersediaan dana dan infrastruktur, serta belum ada integrasi yang kuat antar kementerian. Selain itu, penerapan SIMAYA juga telah diterapkan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan namun kendala dalam implementasinya adalah proses pelayanan kearsipan kepegawaian masih kurang dukungan finansial (Fatmawati, 2020).

Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang sudah telah menerapkan penggunaan aplikasi ini sejak Juli 2020. Hal ini dilandasi dengan adanya Surat Edaran Bupati Sinjai No.32 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam fase *new normal* di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Sejak penggunaan aplikasi SIMAYA di Kabupaten Sinjai, oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana implementasi aplikasi SIMAYA pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi SIMAYA di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai sehingga dapat memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal holistik (*holistic single-case study*) yaitu menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari Implementasi Aplikasi SIMAYA (Studi Kasus di Dinas Komunikasi Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sinjai). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa foto pelaksanaan penerapan aplikasi SIMAYA di lingkup Dinas KOMINFO Sinjai.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *puporsive sampling* dengan melibatkan subjek dalam penelitian yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sinjai, Sekertaris, Kepala Bidang Aptika, Kepala Seksi Pranata Komputer Ahli Muda, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Staff Diskominfo. Kemudian teknik analisis data yaitu teknik *deskriptif*, yaitu dengan cara menghimpun data dan mendeskripsikannya.

Tabel 1.1 Jumlah PNS di Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai

Golongan	Jumlah	Tingkat Pendidikan
IV.c	1	S2
IV.b	1	S1
IV.a	1	S1
III.d	6	S1 (5) S2 (1)
III.c	9	D-III (1) S1 (5) S2 (3)
III.b	3	S1
III.a	3	SMA (1) S1 (2)
II.d	1	SMK
II.c	2	SMA

Sumber data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Sinjai Tahun2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyampaian informasi dalam lingkup instansi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai disampaikan secara lisan dalam hal ini Kepala Dinas kepada Sekertaris untuk ditindak lanjuti terkait penggunaan aplikasi SIMAYA, sedangkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sinjai, sosialisasi aplikasi SIMAYA dilakukan melalui *via zoom* atau *virtual* yang dirangkaikan dengan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan subjek, diketahui bahwa aplikasi SIMAYA mempermudah dan mempercepat administrasi surat menyurat yang ada di DISKOMINFO Sinjai. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, telah diberikan petunjuk berupa *Standart Operational Procedur* (SOP) untuk diimplementasikan ke bawah utamanya bagian sekretariat. Setelah sekretariat memeriksa administrasi sesuai dengan petunjuk arahan Kepala Dinas, maka kemudian diserahkan kepada Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) yang mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan Kepala Dinas ke tingkat Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sinjai. Dianalisis dengan teori implementasi yang digunakan dapat diketahui bahwa komunikasi *transmisi* yaitu Kepala Dinas DISKOMINFO Kabupaten Sinjai selaku pengambil keputusan dalam kebijakan pengimplementasian SIMAYA sudah melakukan penyaluran komunikasi yang baik dengan para pegawai lingkup DISKOMINFO Kabupaten Sinjai. Kemudian hal ini juga didukung dengan teori Edward III yaitu komunikasi kejelasan dimana pelaksana kebijakan telah mengetahui tujuan-tujuan dari adanya aplikasi SIMAYA ini, sehingga saat penerapan, tidak ada kebingungan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Untuk memaksimalkan penggunaan SIMAYA, maka dilakukan sosialisasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai yang dirangkaikan dengan pelatihan penggunaan aplikasi SIMAYA yang dilakukan secara dua tahap; tahap 1 yaitu pelatihan untuk penginputan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk admin yang dilaksanakan pada 13 Juli 2020 melalui *Zoom* yang diikuti oleh 41 perwakilan OPD Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pada tahap 2, dilakukan pelatihan mengirim dan menerima surat elektronik yang dilaksanakan pada 29 Juli 2020 melalui *Zoom* dan diikuti oleh 42 perwakilan OPD Kabupaten Sinjai (Sumber data bidang Aptika Diskominfo, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, juga ditemukan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian masih menggunakan aplikasi SIMAYA ini secara konsisten, namun terdapat beberapa fitur yang tidak digunakan lagi seperti fitur surat keluar dan surat masuk, hal ini dikarenakan untuk surat masuk yang berasal dari instansi lain tidak ada yang mengimplementasikan aplikasi SIMAYA. Sedangkan untuk fitur surat keluar, mengirim surat melalui *Whatsapp* masih dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan harus membuka aplikasi SIMAYA. Adapun fitur yang paling sering digunakan adalah fitur pengarsipan surat.

Sumber Daya

Dalam sebuah implementasi kebijakan sumber daya merupakan salah satu faktor penting, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten namun apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya peralatan/infrastruktur. Sumber-sumber penting dalam mendukung implementasi kebijakan meliputi

staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka serta fasilitas-fasilitas penunjang dalam pengimplementasian SIMAYA.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa staf DISKOMINFO bahwa pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai berpartisipasi penuh dalam pengimplementasian SIMAYA dan memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi atau perangkat komputer dengan baik dan memanfaatkan keberadaan komputer dan fasilitas IT lainnya.

Namun yang menjadi kendala dalam penggunaan SIMAYA adalah akses jaringan internet yang masih belum optimal sehingga menyebabkan staf terkendala menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu mesin scan juga masih menjadi kendala dalam segi jumlah sehingga juga menghambat pengurusan administrasi pelayanan yang ada di DISKOMINFO Kabupaten Sinjai. Selain itu, tidak semua pegawai DISKOMINFO memiliki akun SIMAYA, hanya pimpinan atau kepala divisi yang mempunyai akun SIMAYA sehingga akses penggunaan aplikasi terbatas.

Disposisi

Kesuksesan dari suatu implementasi kebijakan tergantung bagaimana watak ataupun karakteristik yang dimiliki oleh seorang implementor kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai memiliki komitmen untuk penggunaan aplikasi SIMAYA begitupula dengan para pegawai DISKOMINFO Kabupaten Sinjai, sampai saat ini aplikasi SIMAYA masih difungsikan pada instansi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat atau yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian SIMAYA di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai juga responsif dalam menanggapi setiap keluhan dan keperluan setiap pegawai yang berhubungan dengan Sistem SIMAYA

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi itu sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, bagian susunan birokrasi ini melihat dua hal penting pertama yaitu *Standart Operational Procedur* (SOP) dan struktur organisasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama antarpihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edward III (yang dikutip dalam Selviana, 2020) *Strandart Operational Procedure* (SOP) berguna dalam mengkondusifkan segala bentuk tindakan dari pejabat pada organisasi yang telah tersusun secara kompleks, sehingga mampu berjalan secara *fleksibel*. Dalam hal ini, implementasi aplikasi SIMAYA pada DISKOMINFO Kabupaten Sinjai menggunakan Surat Edaran

Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Kehidupan Baru (*The New Normal*) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Adapun dasar pelaksanaan dan *Standart Operational Procedure* (SOP) SIMAYA mengacu pada: (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Intansi Pemerintah (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Edward III (yang dikutip dalam Silviana), implementasi sebuah kebijakan akan berjalan efektif apabila telah diberlakukan fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan yang telah dibuat kepada beberapa pihak yang berbeda dimana selanjutnya akan saling berkoordinasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai telah menyebarkan tanggung jawab kepada beberapa pihak dalam hal ini yaitu bidang APTIKA dan Kepegawaian, dan jajaran pegawai DISKOMINFO untuk berkoordinasi dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMAYA.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai belum berjalan dengan baik, dikarenakan beberapa kendala seperti : (1) Penyimpanan informasi terkait sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIMAYA tidak sepenuhnya diikuti oleh semua staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai. (2) Penggunaan aplikasi SIMAYA masih konsisten digunakan, namun terdapat fitur yang tidak difungsikan maksimal seperti fitur surat keluar dan surat masuk. Selain itu sumber daya penunjang seperti jaringan belum memadai dan mesin *scan* yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. (2019). Wujudkan Sinjai Menuju *Smart City*, Diskominfo Gelar Sosialisasi *Master Plan*. Internet: <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2019/07/03/wujudkan-sinjai-menurut-smart-city-diskominfo-dan-persandian-gelar-sosialisasi-master-plan>. (Akses 11 Agustus 2021).
- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. (2020). Mudahkan Persuratan di Tengah Pandemi, Kominfo Sinjai Perkenalkan Aplikasi “SIMAYA”. Sinjai. Internet: <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2020/07/13/mudahkan-persuratan-di-tengah-pandemi-kominfo-sinjai-perkenalkan-aplikasi-SIMAYA> (Akses 11 Agustus 2021).
- Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo. *Manual Book SIMAYA Pessel*. Jakarta: Kementrian Komunikasi Informatika RI.
- Fatmawati, Setia. (2020). Implementasi Aplikasi SIMAYA Pada Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Universitas Islam Kalimantan Selatan. Internet : <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3911/> (Akses 10 Agustus 2021).

- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA). <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/sistem-administrasi-perkantoran-maya-SIMAYA/>. (Akses 28 Agustus 2021).
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengembangan *E- Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- Selviana. (2020). Implementasi Pelayanan Publik SP4N-Lapor Di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bantaeng. Skripsi dipublikasikan oleh <https://diglibadmin.unismuh.ac.id>
- Yonavilbia, Eka. (2017). Pemkab Sinjai Rencana Terapkan Sistem Berbasis *E- Government*. Sinjai : Info Publik. Internet : <https://infopublik.id/read/237091/pemkab-sinjai-rencana-terapkan-sistem-berbasis-e-government.html> (Akses 10 Agustus 2022).
- Vaguita, Mercya. (2018). Evaluasi Persiapan Pelaksanaan Program Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA) Di Sekertariat Daerah Provinsi Sumatra Barat. Jurnal *Volume 2*, Nomor 1(2018): *Social Issues In Public Service*. <http://jess.ppj.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/54>.(Akses 4 September 2022).